

ABSTRACT

Siti Ainun Mardiyah, The Impact of Industrial Sector Development, Labor Absorption, Minimum Wages, and Population Size on Extreme Poverty in East Java Province, 2014–2023, Advised by Bondan Satriawan, S.E., M.Econ.St.

The Indonesian government, through Presidential Instruction Num. 4 of 2022, has designated the eradication of extreme poverty as a national strategic issue, aiming to reduce it to zero percent by 2024. This study aims to determine the impact of industrial sector development, labor absorption, minimum wage, and population size on extreme poverty in East Java Province from 2014 to 2023. The data used in this study consists of secondary data, including Gross Domestic Product (GDP) for the Manufacturing Sector, Labor Force Participation Rate (LFPR), Municipal/Regency Minimum Wages (UMK), and Population Data obtained from the Central Statistics Agency of East Java Province, the Central Statistics Agency of Probolinggo Regency, and East Java Provincial Governor Regulation Num. 78 of 2013. The method used is panel data regression and the best model, namely the Random Effect Model (REM). The research findings indicate that industrial sector development and labor absorption do not have a significant effect on extreme poverty in regencies and cities in East Java Province. Meanwhile, the minimum wage has a significant negative effect on extreme poverty in regencies and cities in East Java Province, suggesting that an increase in the minimum wage can help reduce extreme poverty rates. Furthermore, population size has a significant negative effect on extreme poverty in regencies and cities in East Java Province, indicating that population growth can be a driver of development if supported by sufficient job opportunities and adequate human capital.

Keywords: Extreme poverty, GDP, Population, TPAK, and UMK.

ABSTRAK

Siti Ainun Mardiyah, Pengaruh Perkembangan Sektor Industri, Penyerapan Tenaga Kerja, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2023, Di Bawah Bimbingan **Bondan Satriawan, S.E., M.Econ.St.**

Pemerintah Indonesia melalui Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun (2022) telah menjadikan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai isu strategis nasional hingga nol persen pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan sektor industri, penyerapan tenaga kerja, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri Pengolahan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Jumlah Penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model terbaik yang digunakan yaitu *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan perkembangan sektor industri dan penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan ekstrem Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan ekstrem Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum mampu mendorong penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Selain itu, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan ekstrem Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk dapat menjadi potensi pembangunan apabila didukung oleh ketersediaan lapangan kerja dan kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Kata Kunci: *Jumlah penduduk, Kemiskinan ekstrem, PDRB, TPAK, dan UMK.*